

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BIAK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Biak

Selanjutnya disebut sebagai *pihak pertama*,

Nama : Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Biak

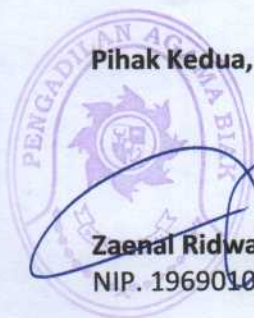
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai *pihak kedua*,

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.
NIP. 19690107 199202 1 001

Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH.
NIP.19740718 199903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA BIAK**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2017 diselesaikan pada tahun 2018 b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan tepat waktu e. Persentase minutasi berkas perkara secara tepat waktu	
2	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	
3	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	
4	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase temuan pengawasan atau pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	
5	Terwujudnya sistem informasi perkara untuk menunjang kinerja peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase informasi perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP	
6	Meningkatnya transparansi pengelolaan belanja layanan perkantoran (operasional) dan non operasional	a. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja pegawai dan operasional b. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja non operasional	
7	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja	Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	




Pihak Kedua

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.
NIP. 19690107 199202 1 001

Biak, 9 Januari 2018

Pihak Pertama


Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH.
NIP.19740718 199903 2 002